BAB I

PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa dalam laporan Kinerja (LKj) tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (*RPJP*) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026, dimana pembangunan diarahkan untuk mendukung laju perekonomian dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada.

Selain pada RPJMD Kabupaten Gowa, pembangunan sektor Koperasi dan UKM di Kabupaten Gowa juga mengacu pada Rencana Stratejik (*Renstra*) dinas yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa. Renstra menetapkan tahapan pembangunan yang ingin dicapai sesuai jangka waktu yang telah direncanakan.

Adapun **tujuan yang ingin dicapai Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan** dengan Sasaran yang ingin dicapai

1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dengan indikator jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasar RAT, Volume Usaha dan Asset di bagi jumlah koperasi aktif
2. Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha dengan indikator jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi jumlah usaha mikro keseluruhan

Dengan mempertimbangkan rencana dan tujuan pembangunan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 sektor Koperasi dan UKM, maka potensi sumberdaya Koperasi dan UKM diarahkan pada pembangunan peningkatan jumlah Koperasi berprestasi dan peningkatan usaha mikro yang menjadi wirausaha tersebar 18 kecamatan.

**1.2. Struktur Organisas**i

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gowa, Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016, tanggal 22 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016.

Untuk lebih jelasnya, susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa dalam bentuk struktur organisasi dapat di lihat pada gambar berikut :

**1.3. Jumlah Personil**

Jumlah personil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) orang yang terdiri atas :

* Kepala Dinas : 1 (satu) orang
* Jumlah Pegawai : 21 Orang

 Pegawai Struktural :16 Orang

Berdasarkan Eselon

Eselon II : 1 Orang

Eselon III : 4 Orang

Eselon IV : 11 Orang

**1.4. Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM**

Tugas Pokok Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa, yaitu: melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidang Koperasi dan UKM sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa mempunyai fungsi;

1. Perumusan kebijakan teknis dan program operasional Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM;
2. Penyusunan Pedoman tentang Kelembagaan Koperasi, usaha Kecil dan Menengah serta memfasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam;
3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Pelaksanaan tugas Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Pelaksanaan urusan Sekretariatan Dinas;

Adapun Tugas Pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa sesuai peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 adalah sebagai berikut:

“**Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang koperasi dan UKM berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan** “.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud Dinas Koperasi dan UKM mempunyai fungsi;

1. Perumusan kebijakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di bidang kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah meliputi bidang pemberdayaan Koperasi, bidang kelembagaan Koperasi, dan bidang pemberdayaan UKM, serta bidang Fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam;
2. Penyusunan pedoman teknis kelembagaan dan usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta memfasilitasi pembiayaan/pemodalan dan simpan pinjam;
3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kelembagaan koperasi, pemberdayaan usaha koperasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam koperasi dan UKM serta Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM;
4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Koperasi dan UKM Kab. Gowa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab. Gowa dan Keputusan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktur pada Dinas Koperasi dan UKM .

1. Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
2. Kepala Dinas;
3. Sekretariat;
4. Sub bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
5. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
6. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
	1. Seksi Advokasi dan Hukum Koperasi
	2. Seksi Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Koperasi
	3. Seksi Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Koperasi
7. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam
8. Seksi Penilaian dan Pembiayaan
9. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan
10. Seksi Simpan Pinjam
11. Bidang Pemberdayaan UKM
12. Seksi Kemitraan
13. Seksi Pengembangan UKM
14. Seksi Promosi
15. Jabatan Fungsional.

 **GAMBAR 2.1**

 **STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN GOWA**

 **STRUKTUR DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN GOWA**

**KEPALA DINAS**

**H.ANDY AZIS PETER, SH,M.Si**

**NIP. 19720902 199303 1 003**

|  |
| --- |
|  |
|  |

**SEKRETARIS**

**HJ. DARMAWATI RASYID,SE,M.BA**

**NIP. 19640304 198903 2 008**

**BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI**

**DRA. RAMSIAH PAGASSINGI, MM**

**19630127 198612 2 001**

**SEKSI ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KOPERASI**

**ASDIANA, SE,MM**

**NIP. 19740130N200701 2 006**

**SUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

**Drs.Muh. Tahir, MM**

**NIP. 19591231 198903 1 086**

**SUBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

**AMIRUDDIN, SE, M.SI**

**NIP. 19651009 199902 1 002**

**BIDANG PEMBIAYAAN DAN SIMPAN PINJAM**

 **HARIS S, SE, M.Si**

**NIP. 19591212 198011 1 005**

**SEKSI PENILAIAN DAN PEMBIAYAAN**

**KURDIANSYAH, SE**

**NIP. 19640828 198603 1 025**

**BIDANG PEMBERDAYAAN UKM**

**SUMIATI, S.Sos**

**NIP. 19601010 198611 1 004**

**SEKSI PENGEMBANGAN UKM**

**NUR UMRIANI, SIP**

**NIP. 19600612 198603 2 017**

**SEKSI PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KOPERASI**

**MUH. TAHIR, S.SOS**

**NIP. 19621231 198303 1 175**

**SEKSI KEMITRAAN**

**ST. NURBAYA, SE**

**NIP. 19640304 198903 2 007**

**SEKSI SIMPAN PINJAM**

**A. RASDIANTI, SE**

**NIP. 19630115 198903 2 006**

**SEKSI ADVOKASI DAN HUKUM** KOPERASI

*ZULFIKAR, SE*

*NIP. 19620220 198603 1 013*

**SEKSI PROMOSI**

**DAHLAN, SH**

**NIP. 19590904 198503 2 009**

**SEKSI PERMODALAN DAN JASA KEUANGAN**

1. **MURNI, SE**

**NIP. 19630924 198212 2 001**

**JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU**

**Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan UKM**

Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan
UKM Kabupaten Gowa hingga akhir tahun 2020 berjumlah 21 orang,
dengan rincian 21 orang berstatus PNS (100 persen). Dari total tersebut, 31 persen berjenis kelamin laki-laki dan 69 persen perempuan. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan sarjana (S1) yaitu sebanyak 14 (Delapan belas) orang dari total PNS yang ada di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Gowa. Sedangkan yang berpendidikan SMU masing – masing sebanyak 1 (satu) orang, sedangkan berpendidikan terakhir S2 sebanyak 6 (enam) orang.

**Tabel Struktur SDM Di Lingkungan Dinas Koperasi &UKM Kab. Gowa**



**Tabel Struktur Berdasarkan Eselon dan Golongan**



Berdasarkan kapasitas SDM dilihat dari eselon dan golongan menunjukan sebaran yang relatif merata sesuai dengan kebutuhan. Menurut eselonnya, sebagian besar pegawai merupakan eselon IV (11 orang). Sedangkan pegawai lainnya mempunyai eselon III (4 orang) dan II (1 orang). Selanjutnya berdasarkan golongannya, sebagian besar pegawai mempunyai golongan III (14 orang), Golongan II (1 orang) diikuti oleh dan golongan IV sebesar 6 orang.

**BAB. II**

**PERENCANAAN KINERJA**

* 1. **Visi dan Misii Bupati Kabupaten Gowa 2021– 2026**

 **Visi, Misi Bupati Gowa**

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Gowa yang telah dituangkan dalam RPJMD dijabarkan dari visi daerah tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam RPJPD. Visi Kabupaten Gowa yang ingin dicapai pada tahun 2021 adalah **“terwujudnya masyarakat yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing dengan tata kelola pemerintahan yang baik”**. Visi tersebut mengandung makna filosofis sebagai berikut:

1. Masyarakat yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing: terwujudnya masyarakat gowa yang lebih cerdas, sehat, religius, berkemampuan ekonomi, mampu memecahkan masalah sendiri dengan sumber daya yang ada serta memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.
2. Tata kelola pemerintahan yang baik: meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, serta terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

 Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama.
2. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi interkoneksitas antar wilayah dan sektor.
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis.
5. Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan secara partisipatif.

Adapun sasaran terukur yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan paritas daya beli serta menurunnya disparitas kesejahteraan masyarakat meliputi angka kemiskinan, pengangguran, indeks pembangunan gender, dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatnya perekonomian daerah dan masyarakat, meliputi nilai PDRB, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, ketahanan pangan, komoditas unggulan daerah, dan UKM unggulan.
3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur di kawasan strategis, perkotaan dan perdesaan, meliputi jalan, jembatan, air bersih, drainase, irigasi teknis, embung dan persampahan.
4. Meningkatnya kualitas layanan publik, kapasitas birokrasi dan pemerintahan yang bersih, meliputi standar pelayanan minimal, indeks kepuasan masyarakat, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, manajemen SDM, *e-government,* akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, *e-procurement*, serta akuntabilitas keuangan dan asset.
5. Meningkatnya pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan, meliputi meningkatnya kapasitas pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, jangkauan pelayanan publik semakin dekat, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan .

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditempuh

 beberapa strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan.

Pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan melalui kebijakan peningkatan kualitas hidup masyarakat dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak, serta keberpihakan pada masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya.

1. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal.

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal melalui kebijakan pemanfaatan sumber daya ekonomi melalui pengembangan komoditas unggulan daerah, pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, serta mendorong terwujudnya ketahanan pangan.

1. Percepatan pembangunan kawasan strategis, perkotaan dan perdesaan.

Percepatan pembangunan kawasan strategis, perkotaan dan perdesaan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh dan interkoneksitas antar wilayah, pembangunan infrastruktur perkotaan sebagai hunian yang nyaman, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di perdesaan.

1. Peningkatan sinergitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Peningkatan sinergitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat dilakukan melalui kebijakan peningkatan kemitraan dan sinergitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya menerapkan prinsip - prinsip pemerintahan yang baik *(good governance)* dengan meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan kapasitas birokrasi, dan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, serta mendorong terwujudnya desa mandiri.

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilakukan melalui pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan hasil-hasil pembangunan. Untuk itu perlu dibuka ruang partisipasi yang luas terutama bagi kelompok masyarakat miskin, pemuda, perempuan dan anak dan kelompok marginal lainnya. Partisipasi tersebut dapat berupa kehadiran dalam Musrenbang di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, sumbangan tenaga kerja dalam kerja bakti atau gotong – royong, sumbangan material, serta sumbangan pemikiran, ide dan gagasan bahkan kritikan.

**2.2 Telaah Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi**

Presiden menetapkan sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) yang perlu dilaksanakan dalam rangka membangun jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, sebagai berikut :

* + - 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
			2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
			3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
			4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
			5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
			6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
			7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
			8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
			9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari sembilan agenda prioritas Presiden tersebut di atas, **tiga Nawa Cita
menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam periode 2015-2020, yaitu:

**Agenda ke-2: Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya** yang mencakup upaya-upaya yang diarahkan antara lain untuk:

* Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat, membuat laporan kinerja, dan membuka akses informasi publik.
* Menjalankan agenda reformasi publik dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervise atas kinerja pelayanan publik.
* Membuka ruang partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik.

**Agenda ke-6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya** yang mencakup upaya-upaya yang diarahkan antara lain untuk:

* Membangun pasar tradisional sebanyak 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada.
* Membangun sejumlah Science dan Techno Park di daerah-daerah.
* Meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belumtergarap dengan baik tetapi memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, yakni, industri manufaktur, industri pangan, sektor maritim, dan pariwisata.

**Agenda ke-7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik** yang mencakup upaya-upaya yang diarahkan antara lain untuk :

* Mewujudkan kedaulatan pangan melalui pendirian Bank Petani dan UKM.

Berdasarkan Visi dan Misi Presiden, Norma dan Dimensi Pembangunan, serta Nawa Cita, maka disusun Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu:
**Mewujudkan Koperasi dan UKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan**.

Tujuan tersebut menjadi landasan bagi penetapan Sasaran-sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2020. Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui upaya-upaya antara lain:

* + - 1. Peningkatan kompetensi UKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri;
			2. Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya;
			3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung koperasi dan UKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;
			4. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat;
			5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya;
			6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan
			7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

Sasaran strategis kementerian Koperasi

1. Meningkatnya kontribusi UKM dan Koperasi dalam perekonomian.
2. Meningkatnya daya saing UKM.
3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif.
4. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha Koperasi.

**Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Selatan**

Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran dari Dinas Koperasi & Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

Visi:

**“MENJADIKAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (KUKM) SEBAGAI PILAR UTAMA PEREKONOMIAN SULAWESI SELATAN “**

Misi:

1. Memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUKM) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional dan simpul jejaring akselerasi perekonomian masyarakat.
2. Memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUKM) untuk menjadi tumpuan harapan hidup, mempunyai kebanggaan dengan menjalankan usaha sesuai dengan aturan agar menjadi lebih produktif.

Tujuan:

1. Meningkatkan jumlah Koperasi yang berkualitas.
2. Meningkatkan peran dan kontribusi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dalam perekonomian daerah.
3. Mengembangkan kebijakan-kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) berdasarkan kondisi kekinian.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUKM).
5. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pemasaran produk Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM).
6. Meningkatkan legalitas dan kualitas produk bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM).
7. Meningkatkan jaringan pemasaran, promosi dan pameran dalam dan luar negeri.
8. Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan usaha produksi dan pemasaran produk Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUKM).
9. Meningkatkan fungsi dan peran lembaga penjaminan kredit daerah.
10. Meningkatkan jiwa dan semangat kewirausahaan serta menumbuhkembangkan wirausaha baru/pemula yang inovatif.
11. Menyediakan regulasi yang berpihak pada Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUKM).

Sasaran:

1. Meningkatnya jumlah koperasi dan UKM yang terfasilitasi sarana dan prasarana (mandiri).
2. Meningkatkan jumlah produk baru yang terfasilitasi perizinan.
3. Meningkatnya jumlah wirausaha baru.
4. Meningkatnya jumlah koperasi aktif.
5. Meningkatnya jumlah koperasi skala besar.
6. Meningkatnya jumlah usaha menengah menjadi usaha besar.
7. Meningkatnya jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah.
8. Meningkatnya jumlah koperasi dan UKM yang dapat mengakses lembaga keuangan.
9. Meningkatnya jumlah pengelola koperasi dan UKM yang terfasilitasi Diklat tekhnis.

 **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional.

RTRWK berfungsi sebagai:

1. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
2. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi:

1. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
2. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
3. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
4. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
5. penataan ruang kawasan strategis kota.

**Rekomendasi KLHS pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa, yaitu :**

1. Penerapan regulasi dibidang lingkungan hidup bagi setiap UKM yang tertuang pada RPJMD Bab VI sasaran 15 yaitu meningkatnya pengembangan Koperasi, UKM dan ekonomi kreatif.
2. Sosialisasi bagi pelaku UKM tentang pengelolaan UKM yang berbasis lingkungan.

**Penentuan isu - isu Strategis**

Penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap factor-faktor penghambat dan pendukung terkait pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUKM) Kabupaten Gowa, yaitu :

1. Perlunya peningkatan kualitas SDM KUKM untuk menghadapi perkembangan IPTEK dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
2. Belum terjaganya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas Produk KUKM karena keterbatasan sarana produksi, rendahnya pemanfaatan teknologi, dan terbatasnya permodalan.
3. Keterbatasan dana sehingga pembinaan yang dilakukan kurang maksimal.
4. Belum optimalnya kemampuan desain dan packing.
5. Terbatasnya pemasaran produk KUKM dan IKM.
	1. **Keterkaitan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Gowa untuk Dinas Koperasi dan UKM**

**KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Visi dan Misi Dinas merupakan penjabaran dari Misi Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Adapun Misi yang terkait dengan Dinas Koperasi dan UKM tersebut adalah Misi ke 2 dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu **“Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan”.**

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Gowa tersebut, tersusunlah Visi dan Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SEBAGAI KEKUATAN EKONOMI KERAKYATAN DI KABUPATEN GOWA.***Dimaknakan sebagai kondisi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi tumpuan perekonomian rakyat dari hulu ke hilir dalam bidang produksi dan sumber daya manusia. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah Koperasi dan UKM yang menjadi berkualitas untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Gowa.

Keterkaitan Misi Pemerintah Kabupaten Gowa pada tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Tujuan Daerah **Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumber**

 **daya local dan sector unggulan daerah dengan indikator tujuan**

 **pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita.**

**2. Sasaran Daerah meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah**

 **sector komoditas unggulan daerah, dengan indikator sasaran**

 **pertumbuhan sector unggulan dalam PDRB**

**3.Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan UKM**

Tujuan dan sasaran jangka menengah menunjukkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan rumusan tujuan dan sasaran yang ditentukan untuk dicapai tahun 2021- 2026 sebagai berikut :

**Tujuan**

*Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sector UMKM.*

**Indikator Tujuan**

*Nilai PDRB sector UMKM*

**Sasaran**

Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha

**Indikator Sasaran**

Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

**Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM**

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dinas koperasi UKM diperlukan perumusan strategis dan kebijakan secara komprehensif. Penyusunan strategi didasarkan dengan kondisi internal dinas koperasi dan UKM yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan. Sedangkan dari sisi ekternal terkait peluang dan tantangan. Selain itu, penyusunan strategi dan kebijakan SKPD ini diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021 – 2026. Strategi dinas koperasi dan UKM dapat dilihat sebagai berikut:

Strategi :

1. *Meningkatkan Motivasi masyarakat terhadap Koperasi dan UKM.*
2. *Meningkatkan SDM dan kelembagaan koperasi dan UKM.*
3. *Meningkatkan kapasitas koperasi dan UKM yang memiliki akses kemitraan.*
4. *Meningkatkan produk KUKM unggulan.*

Kebijakan :

1. *Peningkatan ketatalaksanaan penyuluhan koperasi serta Peningkatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pelatihan.*
2. *Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi dan legalisasi KUKM.*
3. *Peningkatan pengembangan kerjasama KUKM dan informasi bisnis serta pengembangan pemasaran.*
4. *Peningkatan akses KUKM di pihak ketiga serta Peningkatan produk KUKM yang mempunyai pangsa pasar.*

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**
**KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Indikator kinerja program menunjukkan capaian keberhasilan program yang mencerminkan outcome. Sedangkan indikator kinerja kegiatan menunjukkan keluaran (output) dari kegiatan yang dilaksanakan. Data capaian pada tahun awal perencanaan menunjukkan capaian kinerja pada tahun 2021 dan proyeksi capaian tahun 2017. Target kinerja program/ kegiatan yang bersifat persentase atau rasio, pada akhir tahun renstra menunjukkan capaian pada tahun ke-5. Sedangkan target kinerja program/ kegiatan yang bersifat angka absolut, kondisi pada akhir tahun renstra menunjukkan akumulasi dari capaian setiap tahunnya.

* + - 1. **Rencana Program**

Program-program pembinaan dan pengawasan menyesuaikan dengan program-program untuk mencapai sasaran-sasaran pada Misi Dinas Koperasi dan UKM yang telah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan UKM, program-program tersebut adalah sebagai berikut :

Adapun program yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
3. Program Penilaian Kesehatan KSP /USP Koperasi.
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).
7. Program Pengembangan UMKM
8. **Rencana Kegiatan**

Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang memiliki dimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan yang bersifat tahunan ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi program kerja operasional Dinas Koperasi dan UKM yang berdimensi lima tahunan. Kegiatan-kegiatan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

1. **Kegiatan pada Program Prioritas**

1).Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam terdiri dari 2

(dua) kegiatan sebagai berikut:

 1).Penerbitan izin usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi

 dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pemenuhan izin usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota

 2).Penerbitan izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas

 Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam

 Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang,Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

 2).Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi terdiri dari

1. (satu) kegiatan sebagai berikut :

 1.Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit

 Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah

 Kabupaten /Kota

 -Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap peraturan

 perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

 3).Program Penilaian KSP/USP Koperasi terdiri dari 1 (satu)

 kegiatan sebagai berikut :

 1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit

 SimpanPinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya

 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota

 -Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi

 KewenanganKabupaten/Kota.

 4)Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian terdiri dari 1

 (satu) kegiatan sebagai berikut :

 1.Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang

 wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten /Kota

 -Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian

 serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

 Kabupaten/Kota.

 5)Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi terdiri dari

 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

 1.Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaannya

 dalam Daerah Kabupaten /Kota

 -Pemberdayaan peningkatan Produktivitas, nilai Tambah,

 Akses pasar, Akses Pembiayaan, penguatan kelembagaan,

 penataan manajemen, standarisasi, rekstrukturisasi usaha

 Koperasi kewenangan Kabupaten / Kota.

 6).Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan

 Usaha Mikro (UMKM) terdiri dari 3 (satu) kegiatan sebagai

 berikut :

 Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui

 Pendataan, Kemitraan,Kemudahan perizinan, penguatan

 Kelembagaan dan koordinasi dengan para

 pemangku kepentingan.

 1. Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro

 2. Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro

 3. Pemberdayaan kelembagaan potensi danpengembangan usaha mikro

 7). Program Pengembangan UMKMi terdiri dari 1 (satu)

 kegiatan sebagai berikut :

 1.Pengembangan usaha mikro dengan orientasi

 peningkatan skala usahamenjadi usaha kecil.

 -Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam

 pengembangan produsi dan pengolahan, pemasaran,

 SDM, serta desain dan teknologi.

1. **Kegiatan pada Program Penunjang**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa.

 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 2

 (dua) kegiatan :

 1. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA - SKPD

 2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan

 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua)

 kegiatan :

 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN

 3. Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir

 Tahun SKPD

 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri 1 (satu)

 kegiatan :

 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) kegiatan :

 1. Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan

 bangunan kantor

 2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

 3. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

 undangan

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerahterdiri dari 1 (satu) kegiatan :.

1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri

2 (dua) kegiatan :

 1. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

 2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah yang terdiri 3 (tiga) kegiatan :

 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya ppemeliharaan dan

 pajak kendaraan

 Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan

 2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

 3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan

 lainnya

1. **Indikator Kinerja**

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Indikator kinerja untuk Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa berdasarkan program dan kegiatan dapat digambarkan pada tabel 5.1 yang terlampir sebagai kesatuan dari Renstra ini.

**Tabel 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa**

****

**Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran**

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, telah memuat beberapa Indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator tersebut merupakan Indikator yang harus dicapai selama tahun 2021 hingga tahun 2026 lengkap dengan kondisi yang diinginkan pada akhir tahun kelima.

Pada bagian ini dikemukakan Indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa mendukung tercapainya tujuan meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan.

Berikut ini Tabel Indikator kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah selama tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026.

**TabelIndikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

****

Rencana strategis ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, serta penetapan visi dan misi Dinas yang kemudian dijabarkan dalam strategi kebijakan dan program kegiatan Dinas untuk lima tahun ke depan. Renstra ini disusun dan disajikan secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana pemberdayaan Koperasi dan UKM di Kabupaten Gowa pada tahun 2021-2026.

Sistematika Renstra ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Rencana Program Strategis Dinas Koperasi dan UKM ini merupakan program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM pada periode tahun 2021-2026, tentu saja keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan peran aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber pendanaan serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Koperasi dan UKM.

 Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis (Renstra) ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UKM di kabupaten Gowa. Namun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi.

 Oleh sebab itu pelaksanaan Renstra membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi,dengan demikian, dokumen perencanaan ini memilki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya bersifat dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna serta sesuai dengan misi pemberdayaan Koperasi dan UKM yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana program pembangunan daerah pada masa transisi, yang diperlukan bagi penyusunan rancangan anggaran dan belanja daerah (RAPBD) pada masa transisi serta dengan mengingat waktu yang sangat sempit bagi Bupati terpilih hasil Pemilukada maka perlu disusun program – program pembangunan pada masa transisi dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah – masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2026.

Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UKM diharapkan akan membawa kemajuan bagi Koperasi dan UKM, serta mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Tentu saja dukungan semua pihak diperlukan. Khususnya dari seluruh pemangku kepentingan terhadap kemajuan koperasi dan UKM di Kabupaten Gowa.

* 1. **Rencana Kerja Tahun 2023**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

 Dalam rangka menetapkan Program dan Kegiatan yang mengacu pada Permendagri No. 90. Untuk Tahun 2026 Prioritas sebagai berikut :

Adapun program yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

 Gowa.

 -Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

 Daerah

-Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

-Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

-Administrasi Umum Perangkat Daerah

-Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

 Pemerintah Daerah

-Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

-Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

 Pemerintah Daerah

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kacil dan Usaha Mikro (UMKM)
7. Program Pemberdayaan UMKM

**Rencana Kegiatan**

Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang memiliki dimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan yang bersifat tahunan ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi program kerja operasional Dinas Koperasi dan UKM yang berdimensi lima tahunan. Kegiatan-kegiatan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

**1. Program Prioritas**

Rencana program prioritas yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Gowa untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kacil dan Usaha Mikro (UMKM)
7. Program Pemberdayaan UMKM

**2. Program Penunjang**

Sejalan dengan program prioritas yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Gowa untuk tahun 2021 - 2026 juga didukung dengan program penunjang antara lain :

**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa.**

-Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

 Daerah

-Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

-Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

-Administrasi Umum Perangkat Daerah

-Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

 Pemerintah Daerah

-Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

-Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

 Pemerintah Daerah

1. **Kegiatan pada Program Prioritas**

1).Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam terdiri dari 2

 (dua) kegiatan sebagai berikut:

 1).Penerbitan izin usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi

dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pemenuhan izin usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota

 2).Penerbitan izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang

Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk

Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah

Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang,Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

 2).Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi terdiri dari

1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi

Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang

wilayah Keanggotaannya dalam Daerah

Kabupaten /Kota

 -Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap peraturan

perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

3).Program Penilaian KSP/USP Koperasi terdiri dari 1 (satu)

kegiatan sebagai berikut :

 1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit

SimpanPinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota

 -Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi

KewenanganKabupaten/Kota.

4)Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian terdiri dari 1

(satu) kegiatan sebagai berikut :

 1.Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang

wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten /Kota

 -Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian

serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

 Kabupaten/Kota.

 5)Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi terdiri dari

1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

1.Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang wilayah

keanggotaannya

 dalam Daerah Kabupaten /Kota

 -Pemberdayaan peningkatan Produktivitas, nilai Tambah,

Akses pasar, Akses Pembiayaan, penguatan kelembagaan,

penataan manajemen, standarisasi, rekstrukturisasi usaha

Koperasi kewenangan Kabupaten / Kota.

 6).Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan

Usaha Mikro (UMKM) terdiri dari 3 (satu) kegiatan sebagai

berikut :

Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui

Pendataan, Kemitraan,Kemudahan perizinan, enguatan

Kelembagaan dan koordinasi dengan para

pemangku kepentingan.

1. Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro

2. Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro

3.Pemberdayaan kelembagaan potensi dan

pengembangan usaha mikro

 7). Program Pengembangan UMKMi terdiri dari 1 (satu)

kegiatan sebagai berikut :

1.Pengembangan usaha mikro dengan orientasi

peningkatan skala usahamenjadi usaha kecil.

-Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam

 pengembangan produsi dan pengolahan, pemasaran,

SDM, serta desain dan teknologi.

1. **Kegiatan pada Program Penunjang**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa.

* + 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) kegiatan :

 1. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA - SKPD

 2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua)

kegiatan :

 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN

 3. Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir

Tahun SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri 1 (satu)

kegiatan :

 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) kegiatan :

 1. Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

 2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

3.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerahterdiri dari 1 (satu) kegiatan :.

1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri

2 (dua) kegiatan :

 1. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

 2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

 yang terdiri 3 (tiga) kegiatan :

 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya ppemeliharaan dan

pajak kendaraan

 Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan

 2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

 3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan

lainnya

**2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

Sesuai perjanjiankinerja tahun 2021 yang tertuang rencana kinerja program tahun 2020, dengan mengacu pada Renstra tahun 2021 – 2026, maka perjanjian kinerja tahun 2021 meliputi:

 Tabel 1. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

 tahun 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran**  | **Indikator Kinerja**  | **Satuan** | **Target** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Misi 1. Meningkatkan Pelayanan Koperasi dan UKM** |
| 1 | Meningkatkan jumlah UKM Unggulan | a.Akses ke Lembaga Permodalan | Unit | 37 |
|   | b. Jumlah lembaga Pra Koperasi | Unit | 38 |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| **Misi 2. Meningkatkan jumlah UKM Unggulan** |
| 2 | Meningkatnya Koperasi Aktif | a.Jumlah UKM Unggulan | Unit | 20 |
|   | b. Jumlah UKM yang mengelolah bahan baku local | Unit | 10 |
| **Misi 3. Meningkatkan jumlah Koperasi dan UKM yang mengakses ke Lembaga Keuangan** |
|  | Meningkatnya Koperasi Aktif | a. Jumlah Koperasi Aktif |  Unit | 535 |
|   | b. Jumlah Koperasi berkualitas | Unit |  400 |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| **Misi 4. Meningkatnya jumlah Koperasi Aktif** |
| 3 | Meningkatnya Nilai investasi | a. Cakupan pembinaan UKM dan Penerapan Teknologi Tepat Gunab. Meningkatnya luas lahan yang bersertifikat bagi UKM | UnitUnt | 10100 |

**BAB. III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1. Capaian KinerjaOrganisasi Tahun 2021**

Dalam pengukuran capaian kinerja tahun 2021 yang didasarkan pada PP Nomor. 108 Tahun 2000 ditetapkan dengan indikator kinerja yaitu input (*masukan*), output (*keluaran*), outcome (*hasil*), benefit (*manfaat*) dan impact (*dampak*).

Indikator kinerja masukan yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah dan tenaga kerja/SDM dengan satuan orang. Indikator kinerja hasil yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan. Pengukuran pencapaian kinerja yang diukur dalam laporan ini adalah dengan membandingkan capaian kinerja dengan kinerja yang direncanakan untuk tahun 2021.

Capaian kinerja sasaran strategik tahun 2021 menunjukkan tingkat capaian yang optimal,dari sasaran strategik yang direncanakan, indikator hasil kerja (*output*) dan sasaran (*outcome*), serta masukan (*input*), dan sumber daya manusia.Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa dengan capaian kinerja sebagai berikut

:

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | ~~Rumus~~ |  | Capaian (%) |
| MeningkatnyaPengembanganKoperasi dan UMKM | -Prosentase UKM Unggulan-Prosentase Koperasi Aktif | %% | 288 / 225136 / 522 | X 100%X 100% | 128,0026.05 |

Peningkatan prosentase dari sasaran strategis dengan Indikator umkm Unggulan dari Realissi Akhir Tahun berjalan 2021 kinerja tahunan sudah mencapai 128,00 % diatas nilai 100 % sedangkan indikator prosentase koperasi aktif 26,05% belum maksimal dikarenakan Koperasi selalu diadakan pembenahan Koperasi yang tidak aktif dibekukan sekitar 73,95 % unit koperasi akan di usulkan untuk pembinaan amalgamasi,pembubaran dan pembekuan Koperasi pada pendataan, karena berdampak untuk pembebanan pembinaan APBD, jadi masih tinggi pembandingnya.

b.. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel.3.2 Perbandingan antara capaian kinerjaTahun 2021 dengan Tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir

|  |  |
| --- | --- |
| Indikator Kinerja | Capaian (%) |
| 2016Target | 2016Capai(%) | 2017Target | 2017Capai(%) | 2018Target | 2018Capai(%) |
| 1 | Jumlah UKM Unggulan | 25 | 104 | 30 | 166,7 | 35 | 71 |
| 2 | Jumlah Koperasi Aktif | 439 | 102.96 | 454 | 99,78 | 484 | 96 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator Kinerja |  Realisasi Kinerja |
| 2019Target | 2019Capaian (%) | 2020Target | 2020Capaian(%) | 2021Target | 2021Capaian(%) |
| 1 | Jumlah UKM Unggulan | 37 | 122 | 40 | 150 | 21 | 410 |
| 2 | Jumlah Koperasi Aktif | 504 | 90 | 520 | 105,58 | 535 | 25,42 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

c.. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

 target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

 perencanaan perencanaan strategi organisasi

Tabel.3.3 Perbandingan kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan target jangka menengah

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi kinerja target jangka menengah | Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2021 | Capaian (%) |
| 1 | Jumlah UKM Unggulan | Unit | 225 | 288 | 128,00 |
| 2 | Jumlah Koperasi Aktif | Unit | 136 | 522 | 26,05 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

3.2.. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/

 penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pada sasaran pengelolaan sumber daya Koperasi dan UKM untuk peningkatan Koperasi dan UKM ini didukung ;

1. Meningkatnya koperasi Aktif

Target terdapat indikator sasaran dengan dengan ketiga tabel diatas Indikator Program kegiatan rata-rata capaian tecapai di bawah 100 % taget capaian,di karenakan di lakukan pendataan dengan RAT, Asset dan Volume usaha ternyata hanya 136 unit yang dapat masuk kategori aktif

2..Meningkatnya Pembinaan UMKM di 18 Kecamatan.

Target terdapat indikator sasaran dengan Indikator kinerja prosentase UKM Unggulan capaian meningkat diatas 100 % keuangan dan taget dan capaian,

Peningkatan lainnya yang menunjang sasaran Koperasi dan UKM

 Peningkatan Nilai investasi UKM. Target terdapat 1 indikator tercapai 100 % dengan 1 indikator tidak tercapai koperasi berkualitas dengan pendataan ulang tahun 2021 tidak mencapai diatas 100 %

Demikian juga akses permodalan yang di ikutkan ke bantuan permodalan dikirim 99 UKM hanya terjaring sebesar 6 unit UKM dengan rata – rata permodalan RP. 7.000.000,- dan juga pembentukan pra koperasi yang direncanakan 38 unit yang terbentuk hanya 6 unit Koperasi masih dibawah dari rencana yang ditetapkan

 Namun dari program penunjang secara keseluruhan dalam RPJMD lima tahunan masih tercapai dari yang direncanakan.

Meningkatkan pelayanan Administrasi perkantoran.Target terdapat 4 indikator sasaran Program kegiatan rata-rata capaian 100 % keuangan dan taget dan capaian, sedangkan yang tidak tercapai hanya 73 % keuangan karena ada penghematan pada penggunaan listrik, PDAM dan Telpon.. Membaiknya disiplin, kualitas pelayanan dan kinerja aparatur.Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan suatukedisiplinan yang tinggi. Oleh karena itu dalam suatu institut/organisasi harus menciptakandisiplin kerja yang tinggi dalam rangka pencapaian tujuan yang baik. Dalam suatuintitut/organisasi disiplin kerja sangat dibutuhkan, sebab tanpa disiplin kerja yang baik tidakakan dapat menghasilkan suatu hasil yang baik dalam pencapaian tujuan bersamaPegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengahdalam penyelenggaraan administrasi kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan serta profesionalisme aparatur target kinerjanya antara lain cakupan pelayanan administrasi perkantoran, cakupan sarana dan prasaranaa dalam kondisi baik, indeks kehadiran aparatur dapat meningkat serta prosentase ketersediaan informasi capaian kinerja dan keuangandiharapkan dapat mencapai 100 %. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran kinerja bagian sekretariat pada tahun anggaran 2021 adalah :

* + - 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta Telepon.
			2. Penyediaan jasa admninistrasi keuangan
			3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
			4. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
			5. Penyediaan jasa administrasi ketatausahaan kantor
			6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
			7. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
			8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
			9. Peny. laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
			10. Penyusunan Dokumen perencanaan dan Penganggaran
			11. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

Dari kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya sasaran kinerja tersebut untuk kedepannya sarana-prasarana aparatur sangat diharapkan untuk dapat ditingkatkan pengadaannya sehingga disiplin dan kualitas pelayanan dan kinerja aparatur dapat meningkat.

Adapun Kegiatan-Kegiatan yang dikelola Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahKabupaten Gowa pada Tahun 2021 adalah :

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas terdapat permasalahan-permasalahanyang muncul antara lain:

* + - * 1. Jumlah dan kualitas aparat belum memadai sesuai dengan standar yang diharapkan dalam melaksanakan tugasnya.
				2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang dimilki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk mengembang tugas dengan jangkauan wilayah yang luas dan tersebar
				3. Belum maksimalnya kesadaran masyarakat Koperasi dan UKM dalam pemanfaatan teknologi
				4. Terbatasnya data identifikasi Koperasi dan UKM potensial
				5. Kesadaran kelompok untuk memamfaatkan teknologi yang diberikan masih rendah
				6. Rendahnya tingkat perguliran atau bantuan pemerintah
				7. Target pembinaan usaha bagi pelaku usaha tidak tercapai karena anggaran sangat terbatas
				8. Pembinaan pada pelaku usaha pengolah dan pemasaran hasil terbatas terutama bantuan peralatan

Adapun saran untuk solusi untuk tindak lanjut perbaikan di tahun depan adalah :

1. Mengikut sertakan aparat dalam berbagai pelatihan dan bimbingan teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing
2. Diperlukan penambahan sarana dan prasarana pendukung kegiatan terutama kendaraan operasional
3. Dibutuhkan sosialisasi yang makin terfokus secara kontinyu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan mulai dari tingkat desa/keluarahan, kecamatan dan instansi terkait
4. Perlu kegiatan pendataan bidang yang lebih baik, terstruktur yang didukung dengan kesiapan dana dan sumber daya petugas pendata
5. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kelompok dalam memamfaatkan teknologi melalui studi banding
6. Meningkatkan kapasitas pelayanan dengan memaksimalkan efektifitas fasilitas pelayanan
7. Diperlukan tambahan anggaran untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM), pelaku usaha terutama pengolahan dan pemasaran hasil produksi
8. Penyebarluasan informasi serta promosi komoditas unggul melalui pameran, brosur dan media lainnya

**4.3. Realisasi Anggaran**

Tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa 2021 dengan realisasi dana (*input*) mencapai 98.% untuk realisasi keuangan dan secara umum realisasi fisik dilapangan mencapai 100%.

Implementasi untuk mewujudkan sasaran strategi, masing-masing bidang bertanggungjawab terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait.

1. Sekretaris

Target kinerja di bagian Sekretariat adalah penatausahaan keuangan yang sudah meningkat, sarana dan prasarana perkantoran dan suasana kerja sudah memadai, meningkatnya pelaporan-pelaporan dengan tepat waktu serta surat menyurat yang lancar.

Jumlah dana yang terserap untuk menyelenggarakan kegiatan guna mewujudkan target kinerja tersebut selama tahun 2021 mencapai Rp. 415.530.914,00 (Empat ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus empat belas rupiah),- dengan realisasi dana sebesar Rp. 407.220.295 atau 98,00% dari total dana yang direncanakan hasil kinerja yang dicapai sekretariat meliputi :

1. Penyediaan Jasa komunikasi, Listrik dan Air selama 12 bulan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas, degan capaian pemeliharan kendaraan roda empat sebanyak 1 unit, dan jasa perizinan kendaraan roda empat sebanyak 1 unit serta kendaraan roda dua sebanyak 1 unit.
3. Jasa Administrasi Keuangan, dengan capaian pembayaran honorarium pengelola administrasi keuangan sebanyak 15 orang
4. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, yaitu pemeliharaan AC sebanyak 5 unit, computer 2 unit, serta laptop 2 unit dalam kondisi baik.
5. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor, yaitu Alat Tulis Kantor, alat-alat listrik dan elektronik, Perangko materai dan benda-benda pos lainnya, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, dan penggandaan/foto copy.
6. Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah, yaitu melakukan rapat koordinasi dan atau konsultasi baik dalam daerah kabupaten maupun luar kabupaten
7. Pelayanan Administrasi Ketatausahaan, yaitu melakukan pertemuan rutin .
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, yaitu melakukan perbaikan terhadap kerusakan ringan gedung kantor.
9. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu, , dan pakaian olah raga dalam rangka peringatan HUT Republik Indonesia. Tidak digunakan karena Covid 19
10. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD, yaitu menyusun laporan tahunan dinas, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj), Rencana Kerja (Renja), laporan fisik dan keuangan setiap bulan, dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA/DPA), sebanyak 3 dokumen.
11. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, dengan output sebanyak 1 dokumen.
12. Penyusunan Dokumen- Dokumen Perencanaan, yaitu penyediaan data dan informasi tentang sektor Koperasi dan UKM sebanyak 3 dokumen.

|  |
| --- |
| Tabel.3.5 : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Bidang Bidang Tahun 2021 setelah diperuntukan covid 19 dari total anggaran sebagai berikut : |
|  |  |  |  |  |  |
| No. | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN | SUMBER DANA DAU (Rp) | REALISASI PROYEK |
| Fisik (%) | KEUANGAN |
| Rp. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota** |  |  |  |  |
| 1 | Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA - SKPD | 6.977.500 |  100,00  | 6.977.500 |  100,00 |
| 2 | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  7.956.500 | 100,00  | 7.956.500 | 100,00 |
| 3 | Penyediaan administrasi pelaksananaan tugas ASN | 181.576.190 | 97,00  | 175.725.173 | 97,00  |
| 4. | Koordinasi dan penyusunanlaporan akhir tahun SKPD | 5.440.000 | 100,00 | 5.281.917 | 97,00 |
| 5 | Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya | 16.600.000 | 100,00 | 16.600.000 | 100,00 |
| 6 | Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor | 1.452.000 | 100,00 | 1.452.000 | 100,00 |
| 7 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 2.916.000 |  100,00  | 2.916.000 | 100.00 |
| 8 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2.800.000 |  100,00  | 2.800.000 |  100,00  |
|  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya | 10.476.730 | 100.00 | 10.476.730 | 100,00 |
| 10 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik | 19.672.643 |  73,00  | 14.414.985 | 73,00 |
| 11 | Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor | 10.500.000 | 100,00 | 10.500.000 | 100.00 |
| 12 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan | 54.160.950 | 100.00 | 42.458.295 | 75.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  1950000 | 100.00 | 1950000 | 75.00 |
| 14 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  2,382,000 | 100.00 |  2,382,000 | 100.00 |
| 11 | **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** |  |  |  |  |
|  | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota |  12,932,000  | 100.00 |  12,932,000  | 100.00 |
| III | **PROGRAM PENDIDIKN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** |  |  |  |  |
| 1 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi |  21,900,000  | 100.00 |  21,900,000  | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **IV** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** |  |  |  |  |
| 1 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi UsahaKoperasi Kewenangan Kabupaten/Kota |  13,250,000 |  100,00  |  13,250,000 | 100.00 |
|   |  |   |   |   |   |
|  |  |  |   |  |   |
|  |  |  |  |  |  |
| **V** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** |  |  |  |  |
| 1 | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro |  13,050,000 | 100,00 |  13,050,000 | 100,00 |
| 2 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro |  71,700,000 | 100,00 |  70,700,000 | 90,00 |
| **VI** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** |  |  |  |  |
| 1 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi |  38,736,000 | 100,00 |  38,736,000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah anggran | **415.530.914** | **98.00** | **407.220.295,72** | **98.00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Tahun Anggaran 2021 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.Kabupaten Gowa untuk belanja tidak langsug mengelola anggaran sebesar Rp.2.570.804.046,00 bertambah/berkurang Rp. 10.476.730,00 jumlah anggaran setelah perunbahan Rp. 2.534.028.046,00 -untuk belanja langsung Rp. 2.079.232.880 bertambah/berkurang Rp. 10.476.730,00 untuk belanja modal dan barag / Jasa Rp. 454.795.166 jadi jumlah setelah perubahan Rp. 2.544.504.776,- terdiri atas :

* Belanja tdk langsung : Rp. 2.079.232.880,00
* Belanja Langsung : Rp. 415.530.914,00

Realisasi :

1.Belanja Pegawai Rp 8.310.613,00,-

 2.Belanja barang dan Jasa Rp. 396.744.295,00

 3.Belanja Modal Rp. 10.476.000,00

Setelah Perubahan :

1. Belanja Pegawai Rp. 8.310.613,00,

 2. Belanja barang dan Jasa Rp. 396.744.295,00

 3. Belanja Modal Rp. 10.476.000,00

**BAB. IV**

**P E N U T U P**

* 1. **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2021 yakni:

1. Secara Umum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa telah dapat dilaksanakan/diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ukuran keberhasilan ataupun hasil kerja (*Kinerja*) atas pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewajiban diperoleh dari laporan Kinerja pada Bagian Sekretaris dan masing-masing Bidang yang melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan sasaran strategis.
3. Dari 15(lima belas ) kegiatan yang telah ditetapkan dengan jumlah dana sebesar Rp. 415.530.914,00 ,- dengan realisasi sebesar Rp. 407.625.556,72- atau 98 % dari total dana yang direncanakan.
4. Capaian Kinerja ini merupakan hasil kerja dan komitmen seluruh komponen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tupoksi, Sasaran dan Kebijakan yang telah ditetapkan.
	1. **Saran**

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan pada kesimpulan diatas maka disarankan :

1. Dibutuhkan kerjasama dari seluruh staf untuk memperoleh hasil kerja yang lebih baik.
2. Perlunya peningkatan kualitas SDM aparatur untuk dapat menjadi aparat yang profesional dan akuntabel di bidang tugasnya.
3. Peningkatan kinerja aparat sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Demikian laporan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM untuk Tahun Anggaran 2021.

 Sungguminasa, 8 Februari 2022

 Kepala Dinas Koperasi dan UKM

 Kabupaten Gowa,

H.Andy Azis Peter, SH, M.Si

 Pangkat : Pembina TK.I

NIP : 19720902 199303 1 003

**KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa tahun 2021 telah selesai disusun. Penyusunan LKj ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dokumen Laporan Kinerja ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, serta penetapan visi dan misi Dinas yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dengan penyempurnaan Indikator Kinerja dan Program/Kegiatan selama lima tahun kedepan yang disusun untuk mencapai Kinerja tersebut.

 Disadari sepenuhnya bahwa LKj ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang berkompeten untuk lebih menyempurnakan LKJ ini.

 Sungguminasa, 8 Februari 2022

 Kepala Dinas Koperasi dan UKM

 Kabupaten Gowa

**H.Andy Azis Peter, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19720902 199303 1 003

**DAFTAR ISI**

 **KATA PENGANTAR ……………………………………………………..i**

 **DAFTAR ISI ……………………………………………………………..ii**

**BAB I PENDAHULUAN……………………………………………….1**

* 1. LatarBelakang………………………………………………………….1
	2. Landasan Hukum……………………………………………………..2
	3. Jumlah Personil………………………………………………………. 2
	4. Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM………….. 3

**BAB II PERENCANAAN KINERJA..**

2.1 Visi dan Misi Bupati Gowa………………………………………..10

 2.2 Telaah Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi………11

 2.3 Telaah Visi dan Misi Bupati pada Dinas Koperasi &

 UKM…………………………………………….………………………..16

 2.4 Rencana Kerja tahun 2021………………………………………..27

 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022….……………………………….32

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA…………………………………34**

 3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021……………………..35

 3.2 Capaian Kinerja Organisasi…………………………………………35

 a. Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja 2021

 b. Perbandingan antara realisasi Capaian kinerja s/d 2021

 c. Perbandingan Kinerja s/d 2021 dengan Target 5

 tahun

 3.3 Analisis Penyebab Keberhasila/kegagalan serta solusi

 3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2021………………………………….43

**BAB IV. PENUTUP………………………………………………………..50**

LAMPIRAN -LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA (LKJ)

TAHUN ANGGARAN 2021



DINAS KOPERASI DAN UKM

KABUPATEN GOWA

TAHUN 2022